

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Penerimaan Perpajakan;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi . . .

- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

## Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
  - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3) Realisasi . . .

- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp11.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

### Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
  - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032.589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(4) Realisasi . . .

- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :
  - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
  - b. Dana Perimbangan;
  - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(5) Jumlah . . .

- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6 . . .

## Pasal 6

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

## Pasal 7

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Dana Otonomi Khusus;
  - b. Dana Penyeimbang.

(2) Realisasi . . .

- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

a. Pembiayaan . . .

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
  - b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 9

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

#### Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .

Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran

Pembangunan . . .

Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a. Pajak dalam negeri   | Rp 230.933.877.071.291,00 |
| 0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas   | Rp 96.053.086.781.541,00  |
| 0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam   | Rp 18.962.540.616.691,00  |
| 0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah ( PPN dan PPnBM ) | Rp 77.081.494.611.512,00  |
| 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)  | Rp 8.761.514.457.424,00   |
| 0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)  | Rp 2.143.751.203.591,00   |
| 0160 Cukai  | Rp 26.277.199.336.741,00  |
| 0170 Pajak lainnya  | Rp 1.654.290.063.791,00   |
| b. Pajak perdagangan internasional  | Rp 11.114.268.966.041,00  |
| 0210 Bea masuk  | Rp 10.884.595.527.471,00  |
| 0230 Pajak/Pungutan ekspor  | Rp 229.673.438.570,00     |

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| a. Penerimaan sumber daya alam              | Rp | 67.510.032.589.458,00 |
| 0310 Pendapatan minyak bumi                 | Rp | 42.969.051.730.798,00 |
| 0311 Pendapatan minyak bumi                 | Rp | 42.969.051.730.798,00 |
| 0320 Pendapatan gas alam                    | Rp | 18.532.808.804.030,00 |
| 0321 Pendapatan gas alam                    | Rp | 18.532.808.804.030,00 |
| 0330 Pendapatan pertambangan umum           | Rp | 1.981.507.798.202,00  |
| 0331 Pendapatan iuran tetap                 | Rp | 115.930.310.932,00    |
| 0332 Pendapatan royalti batubara            | Rp | 1.865.577.487.270,00  |
| 0340 Pendapatan kehutanan                   | Rp | 3.715.070.160.296,00  |
| 0341 Pendapatan dana reboisasi              | Rp | 2.822.519.186.088,00  |
| 0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan   | Rp | 675.816.263.751,00    |
| 0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan | Rp | 216.734.710.457,00    |
| 0350 Pendapatan perikanan                   | Rp | 311.594.096.132,00    |
| 0351 Pendapatan perikanan                   | Rp | 311.594.096.132,00    |

b. Bagian . . .

|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara               | Rp | 12.616.646.760.146,00 |
| 0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN                                 | Rp | 12.616.646.760.146,00 |
| c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya                              | Rp | 18.753.509.503.346,00 |
| 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                                 | Rp | 73.218.731.084,00     |
| 0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan              | Rp | 2.184.632.807,00      |
| 0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan                         | Rp | 5.729.532.176,00      |
| 0513 Penjualan hasil tambang  | Rp | 261.242.224,00        |
| 0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan            | Rp | 46.845.595.404,00     |
| 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya                  | Rp | 170.767.680,00        |
| 0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | Rp | 2.691.678.283,00      |
| 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                             | Rp | 8.464.046.494,00      |
| 0519 Penjualan lainnya  | Rp | 6.871.236.016,00      |
| 0520 Penjualan aset   | Rp | 57.631.040.497,00     |
| 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah                     | Rp | 6.788.678.532,00      |
| 0522 Penjualan kendaraan bermotor                                     | Rp | 498.052.146,00        |
| 0523 Penjualan sewa beli  | Rp | 38.572.921.829,00     |
| 0524 Penjualan aset bekas milik asing                                 | Rp | 0,00                  |
| 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/ dihapuskan          | Rp | 11.771.387.990,00     |
| 0530 Pendapatan sewa  | Rp | 23.729.413.697,00     |
| 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                                   | Rp | 11.781.545.266,00     |
| 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                                    | Rp | 8.015.645.531,00      |
| 0533 Sewa benda-benda bergerak  | Rp | 2.008.648.399,00      |
| 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                            | Rp | 1.923.574.501,00      |
| 0540 Pendapatan jasa I  | Rp | 2.656.638.126.227,00  |
| 0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya            | Rp | 76.582.095.617,00     |
| 0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum                           | Rp | 2.030.474.963,00      |
|   |    | 0543 Pendapatan . . . |

|      |   |    |                      |
|------|---|----|----------------------|
| 0543 | Pendapatan surat keterangan, visa/<br>paspor dan SIM/ STNK/ BPKB                                | Rp | 312.437.654.255,00   |
| 0544 | Pendapatan jasa pertanahan  | Rp | 5.970.405.727,00     |
| 0545 | Pendapatan hak dan perijinan  | Rp | 1.320.935.949.264,00 |
| 0546 | Pendapatan sensor/karantina/<br>pengawasan/pemeriksaan  | Rp | 56.676.287.507,00    |
| 0547 | Pendapatan jasa tenaga, jasa<br>pekerjaan, jasa informasi, jasa<br>pelatihan dan jasa teknologi | Rp | 557.683.166.806,00   |
| 0548 | Pendapatan jasa Kantor Urusan<br>Agama  | Rp | 47.818.116.994,00    |
| 0549 | Pendapatan jasa bandar udara,<br>kepelabuhanan, dan kenavigasian                                | Rp | 276.503.975.094,00   |
| 0550 | Pendapatan jasa II  | Rp | 1.951.400.938.790,00 |
| 0551 | Pendapatan jasa lembaga keuangan<br>(jasa giro)   | Rp | 1.409.410.378.858,00 |
| 0552 | Pendapatan jasa penyelenggaraan<br>telekomunikasi   | Rp | 375.238.044.372,00   |
| 0553 | Pendapatan iuran lelang untuk fakir<br>miskin   | Rp | 5.989.564.143,00     |
| 0554 | Pendapatan jasa pencatatan sipil  | Rp | 4.791.446.749,00     |
| 0555 | Pendapatan biaya penagihan pajak-<br>pajak negara dengan surat paksa                            | Rp | 2.220.866.015,00     |
| 0556 | Pendapatan uang pewarganegaraan   | Rp | 4.672.502.741,00     |
| 0557 | Pendapatan bea lelang   | Rp | 54.732.676.119,00    |
| 0558 | Pendapatan biaya pengurusan<br>piutang negara dan lelang negara                                 | Rp | 36.337.127.243,00    |
| 0559 | Pendapatan jasa lainnya   | Rp | 58.008.332.550,00    |
| 0560 | Pendapatan rutin dari luar negeri   | Rp | 193.614.948.388,00   |
| 0561 | Pendapatan dari pemberian surat<br>perjalanan Republik Indonesia                                | Rp | 0,00                 |
| 0562 | Pendapatan dari jasa pengurusan<br>dokumen konsuler   | Rp | 193.614.948.388,00   |
| 0570 | Pendapatan bunga  | Rp | 36.621.492.566,00    |
| 0572 | Pendapatan BPPN atas bunga obligasi   | Rp | 36.621.492.566,00    |
| 0610 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan  | Rp | 28.814.140.658,00    |
| 0611 | Legalisasi tanda tangan   | Rp | 197.415.466,00       |
| 0612 | Pengesahan surat di bawah tangan  | Rp | 44.186.868,00        |
| 0613 | Uang meja (leges) dan upah pada<br>panitera badan pengadilan                                    | Rp | 884.936.151,00       |
|      |   |    | 0614 Hasil . . .     |

|      |   |                  |                      |
|------|---|------------------|----------------------|
| 0614 | Hasil denda/denda tilang dan sebagainya                             | Rp               | 21.118.824.122,00    |
| 0615 | Ongkos perkara  | Rp               | 4.368.588.616,00     |
| 0619 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya                          | Rp               | 2.200.189.435,00     |
| 0710 | Pendapatan pendidikan   | Rp               | 1.091.556.874.820,00 |
| 0711 | Uang pendidikan   | Rp               | 972.381.564.688,00   |
| 0712 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan            | Rp               | 9.727.883.290,00     |
| 0713 | Uang ujian untuk menjalankan praktek                                | Rp               | 18.146.137.711,00    |
| 0719 | Pendapatan pendidikan lainnya                                       | Rp               | 91.301.289.131,00    |
|      | Penerimaan lain-lain  | Rp               | 2.640.283.796.619,00 |
| 0810 | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan  | Rp               | 504.400.460.344,00   |
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                            | Rp               | 21.386.869.732,00    |
| 0813 | Penerimaan kembali belanja pensiun                                  | Rp               | 36.764.267.153,00    |
| 0814 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                            | Rp               | 8.458.333.782,00     |
| 0815 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni                 | Rp               | 139.226.814.736,00   |
| 0816 | Penerimaan kembali belanja pembangunan luar negeri                  | Rp               | 298.564.174.941,00   |
| 0820 | Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu | Rp               | 223.095.633.878,00   |
| 0821 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                            | Rp               | 13.978.065.570,00    |
| 0822 | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom                    | Rp               | 422.645.771,00       |
| 0823 | Penerimaan kembali belanja pensiun                                  | Rp               | 4.172.292.115,00     |
| 0824 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                            | Rp               | 181.576.512.701,00   |
| 0825 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni                 | Rp               | 20.995.224.043,00    |
| 0826 | Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri         | Rp               | 1.950.893.678,00     |
| 0840 | Pendapatan pelunasan piutang  | Rp               | 9.162.972.129.243,00 |
| 0841 | Pendapatan pelunasan piutang  | Rp               | 9.162.972.129.243,00 |
|      | 0890  | Pendapatan . . . |                      |

|      |   |    |                      |
|------|---|----|----------------------|
| 0890 | Pendapatan lain-lain  | Rp | 2.749.815.573.154,00 |
| 0891 | Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji                            | Rp | 7.207.571.698,00     |
| 0892 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan                 | Rp | 26.261.158.268,00    |
| 0893 | Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara | Rp | 8.126.892.709,00     |
| 0894 | Pendapatan denda administrasi BPHTB                                   | Rp | 39.733.257,00        |
| 0895 | Penerimaan premi penjaminan perbankan nasional                        | Rp | 0,00                 |
| 0899 | Pendapatan anggaran lainnya   | Rp | 2.708.180.217.222,00 |

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

|      |   |    |                    |
|------|---|----|--------------------|
| 01   | SEKTOR INDUSTRI                                     | Rp | 33.772.135.791,00  |
| 01.1 | Subsektor Industri                                  | Rp | 33.772.135.791,00  |
| 02   | SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | Rp | 784.343.751.948,00 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian                                 | Rp | 334.822.319.803,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan                                 | Rp | 379.846.394.661,00 |
| 02.3 | Subsektor Kelautan dan Perikanan                    | Rp | 69.675.037.484,00  |

03 SEKTOR . . .

|    |  |    |                        |
|----|--|----|------------------------|
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN   | Rp | 58.477.635.262,00      |
|    | 03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan                  | Rp | 57.493.543.433,00      |
|    | 03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air          | Rp | 984.091.829,00         |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA  | Rp | 231.227.431.038,00     |
|    | 04.1 Subsektor Tenaga Kerja  | Rp | 231.227.431.038,00     |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | Rp | 146.211.467.956.197,00 |
|    | 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                | Rp | 14.204.405.022,00      |
|    | 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                 | Rp | 86.522.351.061,00      |
|    | 05.4 Subsektor Keuangan  | Rp | 146.072.672.271.017,00 |
|    | 05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah            | Rp | 38.068.929.097,00      |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                         | Rp | 659.942.199.657,00     |
|    | 06.1 Subsektor Prasarana Jalan   | Rp | 31.168.635.679,00      |
|    | 06.2 Subsektor Transportasi Darat                                      | Rp | 29.938.991.753,00      |
|    | 06.3 Subsektor Transportasi Laut                                       | Rp | 404.760.251.849,00     |
|    | 06.4 Subsektor Transportasi Udara                                      | Rp | 99.625.491.714,00      |
|    | 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan      | Rp | 94.448.828.662,00      |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   | Rp | 398.769.252.049,00     |
|    | 07.1 Subsektor Pertambangan  | Rp | 381.633.250.107,00     |
|    | 07.2 Subsektor Energi  | Rp | 17.136.001.942,00      |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 | Rp | 430.702.785.109,00     |
|    | 08.1 Subsektor Pariwisata  | Rp | 161.782.977.349,00     |
|    | 08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika                     | Rp | 268.919.807.760,00     |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH  | Rp | 64.928.641.338,00      |
|    | 09.1 Subsektor Otonomi Daerah  | Rp | 42.010.944.952,00      |
|    | 09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat        | Rp | 22.917.696.386,00      |
|    |  |    | 10 SEKTOR . . .        |

|      |  |    |                      |
|------|--|----|----------------------|
| 10   | SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG               | Rp | 600.475.465.932,00   |
| 10.1 | Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup                            | Rp | 21.229.208.825,00    |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan  | Rp | 579.246.257.107,00   |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA               | Rp | 5.386.414.114.762,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan   | Rp | 4.691.063.561.635,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  | Rp | 630.073.125.974,00   |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional  | Rp | 31.495.687.172,00    |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga   | Rp | 33.781.739.981,00    |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA   | Rp | 903.431.469.301,00   |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga  | Rp | 903.431.469.301,00   |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN         | Rp | 532.963.022.851,00   |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial   | Rp | 79.224.624.135,00    |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan  | Rp | 453.738.398.716,00   |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  | Rp | 49.169.077.131,00    |
| 14.1 | Subsektor Perumahan  | Rp | 4.047.887.308,00     |
| 14.2 | Subsektor Permukiman   | Rp | 45.121.189.823,00    |
| 15   | SEKTOR AGAMA   | Rp | 2.136.385.188.624,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                                     | Rp | 562.498.071.582,00   |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                                       | Rp | 1.573.887.117.042,00 |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI                                      | Rp | 822.131.940.069,00   |
| 16.1 | Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi         | Rp | 3.364.004.070,00     |
| 16.2 | Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi       | Rp | 540.132.466.683,00   |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi | Rp | 26.916.334.971,00    |
| 16.4 | Subsektor Statistik  | Rp | 251.719.134.345,00   |
| 17   | SEKTOR HUKUM   | Rp | 2.012.293.057.893,00 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional   | Rp | 1.690.559.603.589,00 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum   | Rp | 321.733.454.304,00   |

18 SEKTOR . . .

|      |   |    |                       |
|------|---|----|-----------------------|
| 18   | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN                                       | Rp | 4.308.856.550.331,00  |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara   | Rp | 3.787.110.984.709,00  |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan                   | Rp | 521.745.565.622,00    |
| 19   | SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Rp | 2.568.683.821.444,00  |
| 19.1 | Subsektor Politik Dalam Negeri  | Rp | 78.819.379.517,00     |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri  | Rp | 2.432.950.020.135,00  |
| 19.3 | Subsektor Informasi dan Komunikasi  | Rp | 56.914.421.792,00     |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  | Rp | 18.749.415.031.425,00 |
| 20.1 | Subsektor Pertahanan  | Rp | 11.626.867.259.643,00 |
| 20.2 | Subsektor Keamanan  | Rp | 7.122.547.771.782,00  |

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

- a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp50.345.280.755.117,00 (lima puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

|      |   |    |                      |
|------|---|----|----------------------|
| 01   | SEKTOR INDUSTRI                                     | Rp | 472.258.210.249,00   |
| 01.1 | Subsektor Industri                                  | Rp | 472.258.210.249,00   |
| 02   | SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | Rp | 3.761.796.436.856,00 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian                                 | Rp | 2.443.409.619.305,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan                                 | Rp | 108.552.724.196,00   |
| 02.3 | Subsektor Kelautan dan Perikanan                    | Rp | 1.209.834.093.355,00 |

03 SEKTOR ...

|      |  |    |                      |
|------|--|----|----------------------|
| 03   | SEKTOR PENGAIRAN   | Rp | 2.650.234.851.217,00 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan                       | Rp | 1.593.270.120.568,00 |
| 03.2 | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air               | Rp | 1.056.964.730.649,00 |
| 04   | SEKTOR TENAGA KERJA  | Rp | 439.677.803.307,00   |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja   | Rp | 439.677.803.307,00   |
| 05   | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | Rp | 1.890.463.565.290,00 |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                     | Rp | 96.299.492.428,00    |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                      | Rp | 286.677.384.204,00   |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                                  | Rp | 119.103.772.693,00   |
| 05.4 | Subsektor Keuangan   | Rp | 206.141.041.731,00   |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                 | Rp | 1.182.241.874.234,00 |
| 06   | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                         | Rp | 5.236.093.512.799,00 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan  | Rp | 3.551.398.241.838,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat   | Rp | 741.044.870.270,00   |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut  | Rp | 402.681.004.126,00   |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara   | Rp | 443.495.144.744,00   |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan           | Rp | 97.474.251.821,00    |
| 07   | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   | Rp | 1.322.405.058.854,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan   | Rp | 128.309.897.834,00   |
| 07.2 | Subsektor Energi   | Rp | 1.194.095.161.020,00 |
| 08   | SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 | Rp | 319.821.647.640,00   |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata   | Rp | 260.786.674.550,00   |
| 08.2 | Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika                          | Rp | 59.034.973.090,00    |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH  | Rp | 1.109.956.950.825,00 |
| 09.1 | Subsektor Otonomi Daerah   | Rp | 137.626.530.386,00   |
| 09.2 | Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat             | Rp | 972.330.420.439,00   |

|      |  |    |                       |
|------|--|----|-----------------------|
| 10   | SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG               | Rp | 385.158.446.837,00    |
| 10.1 | Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                            | Rp | 266.031.449.877,00    |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan  | Rp | 119.126.996.960,00    |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA               | Rp | 13.698.306.553.722,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan   | Rp | 12.640.908.652.314,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  | Rp | 671.048.987.112,00    |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional  | Rp | 139.167.541.041,00    |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga   | Rp | 247.181.373.255,00    |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA   | Rp | 558.436.027.157,00    |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga  | Rp | 558.436.027.157,00    |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN          | Rp | 5.745.779.670.398,00  |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial   | Rp | 1.674.645.560.427,00  |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan  | Rp | 4.004.918.228.659,00  |
| 13.3 | Subsektor Pemberdayaan Perempuan   | Rp | 66.215.881.312,00     |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  | Rp | 1.506.833.700.816,00  |
| 14.1 | Subsektor Perumahan  | Rp | 588.313.909.337,00    |
| 14.2 | Subsektor Permukiman   | Rp | 918.519.791.479,00    |
| 15   | SEKTOR AGAMA   | Rp | 140.548.065.735,00    |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                                     | Rp | 81.468.456.285,00     |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                                       | Rp | 59.079.609.450,00     |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI                                      | Rp | 1.103.038.220.303,00  |
| 16.1 | Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) | Rp | 221.287.542.656,00    |
| 16.2 | Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek                                | Rp | 366.283.585.567,00    |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Iptek                          | Rp | 212.483.915.516,00    |
| 16.4 | Subsektor Statistik  | Rp | 302.983.176.564,00    |
| 17   | SEKTOR HUKUM   | Rp | 1.001.248.702.921,00  |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional   | Rp | 44.689.697.331,00     |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum   | Rp | 956.559.005.590,00    |

18 SEKTOR ...

|   |   |    |                      |
|---|---|----|----------------------|
| 18  | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN                                       | Rp | 2.742.114.490.255,00 |
| 18.1  | Subsektor Aparatur Negara   | Rp | 2.683.416.835.953,00 |
| 18.2  | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan                   | Rp | 58.697.654.302,00    |
| 19  | SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Rp | 302.048.423.240,00   |
| 19.1  | Subsektor Politik Dalam Negeri  | Rp | 48.306.247.995,00    |
| 19.2  | Subsektor Hubungan Luar Negeri  | Rp | 48.233.352.189,00    |
| 19.3  | Subsektor Informasi dan Komunikasi  | Rp | 205.508.823.056,00   |
| 20  | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  | Rp | 5.959.060.416.696,00 |
| 20.1  | Subsektor Pertahanan  | Rp | 4.377.527.755.635,00 |
| 20.2  | Subsektor Keamanan  | Rp | 1.581.532.661.061,00 |
| b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp18.901.749.617.515,00 (delapan belas triliun sembilan ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas : |   |    |                      |
| (dalam rupiah)  |   |    |                      |
| 01  | SEKTOR INDUSTRI   | Rp | 283.202.521.804,00   |
| 01.1  | Subsektor Industri  | Rp | 283.202.521.804,00   |
| 02  | SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN                         | Rp | 513.890.966.941,00   |
| 02.1  | Subsektor Pertanian   | Rp | 313.103.389.502,00   |
| 02.2  | Subsektor Kehutanan   | Rp | 1.168.576.961,00     |
| 02.3  | Subsektor Kelautan dan Perikanan  | Rp | 199.619.000.478,00   |
| 03  | SEKTOR PENGAIRAN  | Rp | 1.886.521.313.299,00 |
| 03.1  | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan                            | Rp | 732.356.014.444,00   |
| 03.2  | Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air                    | Rp | 1.154.165.298.855,00 |
| 04  | SEKTOR TENAGA KERJA   | Rp | 143.590.887.029,00   |
| 04.1  | Subsektor Tenaga Kerja  | Rp | 143.590.887.029,00   |
|   |   |    | 05 SEKTOR ...        |

|      |  |    |                      |
|------|--|----|----------------------|
| 05   | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | Rp | 61.310.946.212,00    |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                     | Rp | 0,00                 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                      | Rp | 0,00                 |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                                  | Rp | 1.259.432.900,00     |
| 05.4 | Subsektor Keuangan   | Rp | 56.608.426.097,00    |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                 | Rp | 3.443.087.215,00     |
| 06   | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                         | Rp | 3.505.457.302.096,00 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan  | Rp | 1.495.428.120.542,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat   | Rp | 589.501.692.161,00   |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut  | Rp | 770.045.594.901,00   |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara   | Rp | 649.388.250.792,00   |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan           | Rp | 1.093.643.700,00     |
| 07   | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   | Rp | 2.684.306.882.439,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan   | Rp | 0,00                 |
| 07.2 | Subsektor Energi   | Rp | 2.684.306.882.439,00 |
| 08   | SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 | Rp | 258.723.676.129,00   |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata   | Rp | 11.562.052.607,00    |
| 08.2 | Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika                          | Rp | 247.161.623.522,00   |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH  | Rp | 2.561.296.503.633,00 |
| 09.1 | Subsektor Otonomi Daerah   | Rp | 607.691.692.435,00   |
| 09.2 | Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat             | Rp | 1.953.604.811.198,00 |
| 10   | SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG           | Rp | 254.323.862.337,00   |
| 10.1 | Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                        | Rp | 221.216.498.663,00   |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                                    | Rp | 33.107.363.674,00    |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA           | Rp | 2.267.260.829.192,00 |
|      |  |    | 11.1 Subsektor . . . |

|      |  |    |                      |
|------|--|----|----------------------|
| 11.1 | Subsektor Pendidikan   | Rp | 2.240.173.677.519,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  | Rp | 13.701.287.498,00    |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional  | Rp | 13.385.864.175,00    |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga   | Rp | 0,00                 |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA   | Rp | 134.129.025.254,00   |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga  | Rp | 134.129.025.254,00   |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN          | Rp | 1.294.285.368.994,00 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial   | Rp | 31.601.161.434,00    |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan  | Rp | 1.261.577.854.560,00 |
| 13.3 | Subsektor Pemberdayaan Perempuan   | Rp | 1.106.353.000,00     |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  | Rp | 244.186.330.553,00   |
| 14.1 | Subsektor Perumahan  | Rp | 87.955.014.515,00    |
| 14.2 | Subsektor Permukiman   | Rp | 156.231.316.038,00   |
| 15   | SEKTOR AGAMA   | Rp | 0,00                 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                                     | Rp | 0,00                 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                                       | Rp | 0,00                 |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI                                      | Rp | 131.844.640.646,00   |
| 16.1 | Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) | Rp | 88.462.481.413,00    |
| 16.2 | Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek                                | Rp | 11.899.645.755,00    |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Iptek                          | Rp | 27.500.826.404,00    |
| 16.4 | Subsektor Statistik  | Rp | 3.981.687.074,00     |
| 17   | SEKTOR HUKUM   | Rp | 4.102.171.240,00     |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional   | Rp | 0,00                 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum   | Rp | 4.102.171.240,00     |
| 18   | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN                                      | Rp | 407.255.000.887,00   |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara  | Rp | 395.592.040.432,00   |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan                  | Rp | 11.662.960.455,00    |

19 SEKTOR . . .

|      |   |    |                      |
|------|---|----|----------------------|
| 19   | SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Rp | 0,00                 |
| 19.1 | Subsektor Politik Dalam Negeri  | Rp | 0,00                 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri  | Rp | 0,00                 |
| 19.3 | Subsektor Informasi dan Komunikasi  | Rp | 0,00                 |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  | Rp | 2.266.061.388.830,00 |
| 20.1 | Subsektor Pertahanan  | Rp | 283.356.851.131,00   |
| 20.2 | Subsektor Keamanan  | Rp | 1.982.704.537.699,00 |

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

|    |  |    |                        |
|----|--|----|------------------------|
| 1. | Perbankan Dalam Negeri                           | Rp | 8.258.243.500.000,00   |
|    | Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya       | Rp | 8.258.243.500.000,00   |
| 2. | Nonperbankan Dalam Negeri                        | Rp | 23.856.493.582.545,00  |
| a. | Privatisasi                                      | Rp | 7.300.540.850.000,00   |
| b. | Penjualan aset program restrukturisasi perbankan | Rp | 19.660.800.000.000,00  |
| c. | Surat utang negara (neto)                        | Rp | (3.104.847.267.455,00) |
|    | - Penerbitan                                     | Rp | 11.318.894.563.405,00  |
|    | Dikurangi dengan :                               |    |                        |
|    | - Pembayaran pokok                               | Rp | 6.165.498.330.860,00   |
|    | - Pembelian kembali                              | Rp | 8.258.243.500.000,00   |

Pembiayaan . . .

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)     | Rp | 20.359.596.156.457,00 |
| - Penarikan pinjaman program                  | Rp | 1.792.094.535.000,00  |
| - Penarikan pinjaman proyek                   | Rp | 18.567.501.621.457,00 |
| Dikurangi dengan :                            |    |                       |
| b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri | Rp | 19.812.001.323.666,00 |
| - Jatuh tempo                                 | Rp | 20.059.026.062.500,00 |
| Dikurangi dengan :                            |    |                       |
| - Penjadwalan kembali                         | Rp | 247.024.738.834,00    |
| i. Pokok                                      | Rp | 204.451.964.000,00    |
| ii. Bunga                                     | Rp | 42.572.774.834,00     |

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

Pasal 11

Cukup jelas.